

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada hakikatnya pembangunan adalah proses perubahan yang sejalan secara terus menerus untuk mencapai suatu kondisi kehidupan yang lebih baik, secara materiil maupun juga spiritual. Pembangunan haruslah dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, serta institusi-institusi nasional, di samping mengejar akselerasi, pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2006). Secara umum makna pembangunan adalah setiap usaha mewujudkan hidup yang lebih baik sebagaimana yang didefinisikan oleh suatu negara “*an increasing of one’s own cultural values*” (Tjokrowinoto, 1996).

Pokok pemikiran pembangunan tertuju pada cita-cita keadilan sosial. Untuk itu, pembangunan butuh proses dan tahapan terukur. Tahapan itu harus dapat menyentuh berbagai bidang, yakni pertama ekonomi sebagai ukuran materiil, kedua adalah tahapan kesejahteraan sosial, ketiga adalah tahapan keadilan sosial. Dari hal tersebut untuk mencapai sebuah pembangunan yang baik, pengukuran ekonomi tidak hanya menjadi tolok ukur utama, tetapi kesejahteraan masyarakat serta berusaha untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi terjaganya harapan dan asa pembangunan yang baik untuk kesejahteraan di masa depan. Inti dari konsep pembangunan berkelanjutan berasal dari konsep *Triple Bottom Line*, yang menyatakan keseimbangan antara tiga pilar, yakni perolehan *profit*,

kepedulian sosial dan pelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yang utuh dapat dicapai melalui keseimbangan antara semua pilar tersebut (Klarin Tomislav, 2018). Secara implisit, terdapat dua hal yang menjadi perhatian dalam konsep ini yaitu pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi, serta pentingnya kesejahteraan (*well being*) untuk generasi mendatang. Dengan demikian, prinsip pembangunan berkelanjutan menghasilkan tiga aksioma yakni : (a) perlakuan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif jangka panjang, (b) menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap *economic well being*, (c) mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan (Fauzi & Oxtavianus, 2014).

Penelitian yang dilakukan Mirza (2011) yang menyatakan bahwa paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di setiap negara. Faktor penting untuk dapat melihat kemampuan suatu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya adalah keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Becker tahun 1965 yang mengemukakan bahwa investasi dalam meningkatkan *human capital* adalah penting sebagai suatu investasi dari bentuk-bentuk modal lainnya. *Human capital theory* berpendapat bahwa manusia bukan sekedar sumber daya namun merupakan modal (*capital*) yang menghasilkan pengembalian (*return*) dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal sehingga mempunyai pengaruh yang

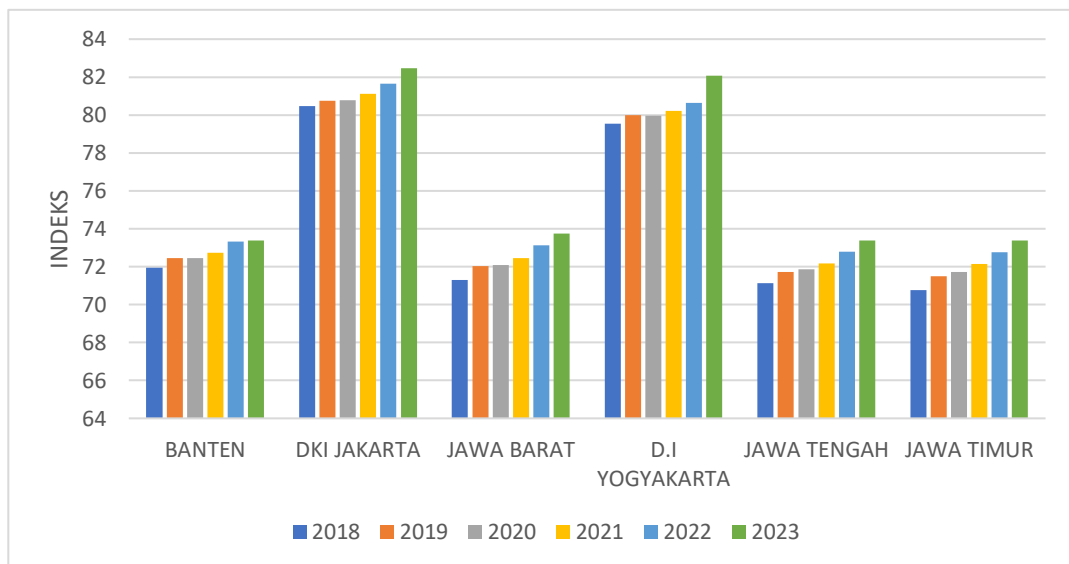
besar terhadap peningkatan produktivitas yang tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pelatihan dan pendidikan sehingga pembangunan manusia patut untuk terus ditingkatkan.

Pembangunan manusia merupakan parameter utama dari pembangunan suatu negara, karena menempatkan manusia sebagai objek pembangunan, maka untuk melihat kualitas pembangunan manusia diperlukan suatu ukuran yang dapat menggambarkan tingkat kualitas manusia. Pengukuran tersebut menggunakan pengukuran *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia melahirkan beberapa konsep, yakni : 1) Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian, 2) Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka, 3) Pembangunan manusia bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal, 4) Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu : produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan, 5) Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Tinggi atau rendahnya IPM suatu negara tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi pada negaranya. Semakin maju suatu negara akan semakin baik tingkat pembangunan manusia di wilayah tersebut. Untuk melihat capaian keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan pembangunan manusia bisa dibedakan menjadi

4 kategori, yaitu sangat tinggi ($IPM \geq 80$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan rendah ($IPM < 60$).

Menurut Badan Pusat Statistik (2023), IPM Indonesia menyentuh angka 73,55 yang dapat dikategorikan tinggi. Dengan hal tersebut dapat menjadikan modal yang cukup bagus bagi pemerintah Indonesia untuk dapat mengevaluasi serta terus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, dengan memperbaiki tata kelola serta melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang tetap memperhatikan kelestariannya serta pemanfaatan tersebut haruslah berorientasi pada kesejahteraan masyarakat agar taraf hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih baik lagi dan dibarengi terjaganya sumber daya alam yang ada.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1.1
Indeks Pembangunan Manusia Enam Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2018-2023

Berdasarkan gambar 1.1 data pada Badan Pusat Statistik (2023) dari enam provinsi yang ada di pulau Jawa, provinsi dengan rasio Indeks Pembangunan

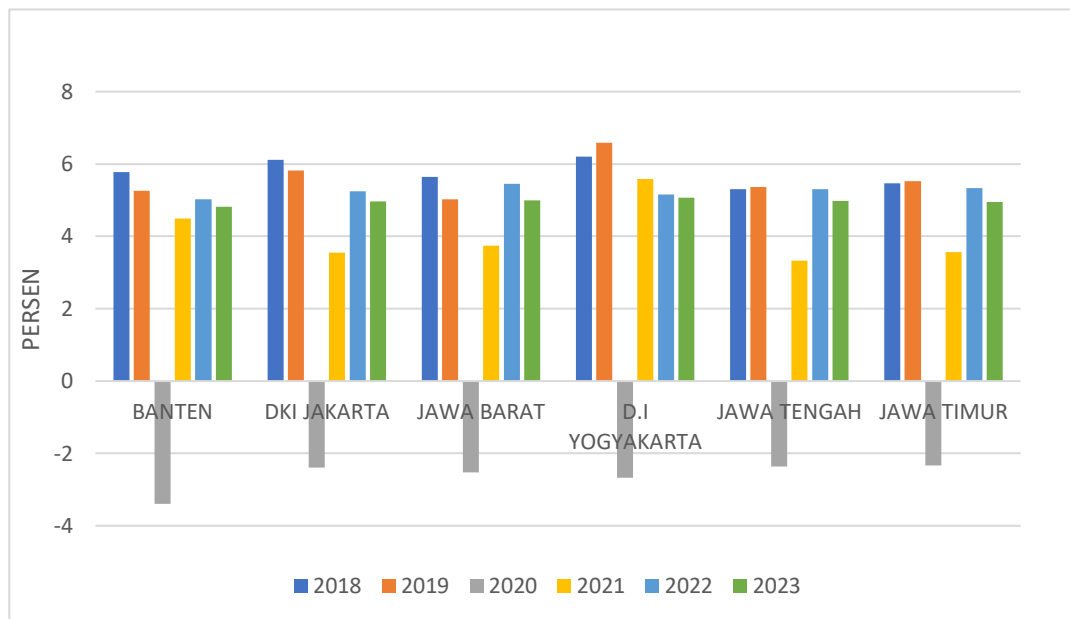
Manusia tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta, disusul Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur serta Provinsi Banten menjadi Provinsi dengan rasio terendah di Pulau Jawa.

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang menjadi penopang terbesar perekonomian Indonesia, dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi dari ke enam provinsi yang ada yakni Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta dan Jawa timur. Menurut Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud, sumbangsih Pulau Jawa dari kontribusi terhadap PDB nasional dengan peranan sebesar 57,27 persen dan mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,18 persen secara tahunan. Sementara Pulau Sumatra kontribusi terhadap PDB sebesar 21,94 persen, Pulau Kalimantan sebesar 8,32 persen, Pulau Sulawesi sebesar 7,13 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,77 persen serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,57 persen. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa pulau Jawa merupakan pusat perekonomian di Indonesia.

Namun keberhasilan Pulau Jawa dalam menjadi penopang perekonomian negara tak lepas dari geliat perekonomian per tiap provinsinya di Pulau Jawa itu sendiri, seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa pembangunan kualitas manusia salah satu faktornya adalah pertumbuhan ekonominya, salah satu pengukuran pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi provinsi di pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi merupakan perbandingan kenaikan atau penurunan antara ekonomi tahun terbaru dengan ekonomi tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dasar yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan atau menyusun ekonomi karena indikator ini menggambarkan

pengukuran hasil-hasil pembangunan secara kuantitas. Perekonomian dapat dikatakan meningkat bila pendapatan masyarakat lebih besar dari pendapatan tahun sebelumnya.

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan oleh Kuznet di mana salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi adalah tingginya pertumbuhan *output* per kapita, pertumbuhan *output* yang dimaksud adalah PDRB per kapita, tingginya pertumbuhan *output* menjadikan perubahan pola konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan, artinya semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pertumbuhan *output* per kapita dan merubah pola konsumsi dalam hal ini tingkat daya beli masyarakat juga akan semakin tinggi. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan indeks pembangunan manusia karena daya beli masyarakat merupakan salah indikator dalam IPM disebut indikator pendapatan, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (Irawan, 2022).



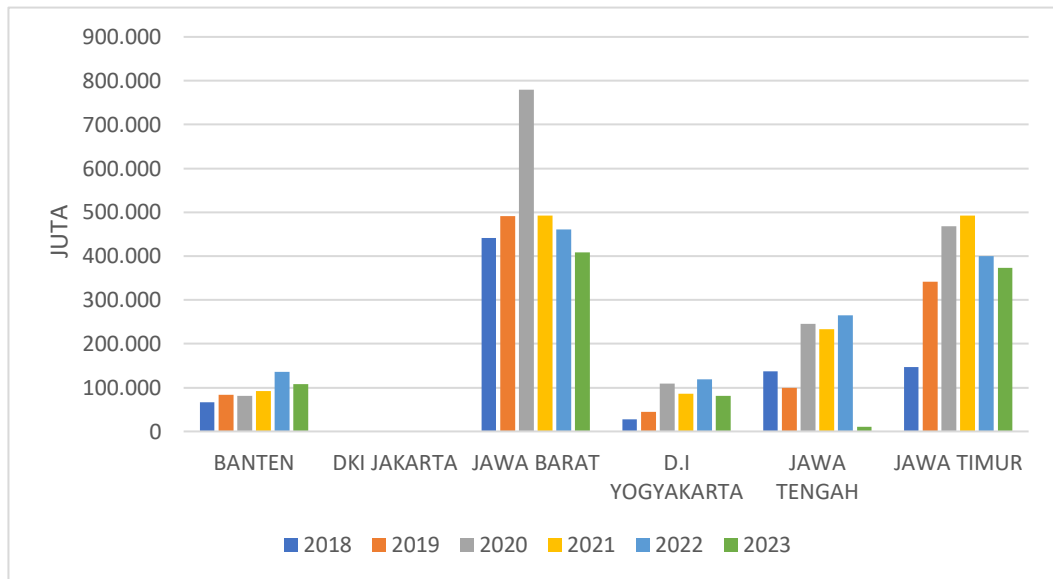
Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Enam Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2018-2023

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat dalam enam tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2020 semua provinsi tersebut mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dikarenakan pandemi COVID-19 yang melumpuhkan aktivitas perekonomian Indonesia. Provinsi D.I Yogyakarta menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan provinsi lainnya, dapat dilihat pada tahun 2023 D.I Yogyakarta memiliki persentase pertumbuhan ekonomi 5,07% . lalu ada Provinsi Jawa Barat menempati posisi kedua laju pertumbuhan ekonomi tertinggi lalu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur dan Banten sebagai provinsi sebagai dengan persentase pertumbuhan ekonomi terendah di pulau Jawa.

Salah satu pengukuran dalam menilai indeks pembangunan manusia adalah melihat bagaimana kualitas pendidikan di suatu wilayah. Pendidikan merupakan ujung tombak dari sebuah negara, ketika sebuah negara memiliki masyarakat dengan rata-rata pendidikan mumpuni, maka negara tersebut berpotensi menjadi negara yang unggul, karena memiliki penduduk yang berkualitas. Namun hal tersebut perlu didukung dengan fasilitas yang memadai, maka dari itu pemerintah memiliki anggaran khusus untuk membangun infrastruktur pendidikan di Indonesia.

Anggaran tersebut tercantum dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan, sebagai implementasi dari kebijakan desentralisasi fiskal untuk tiap Provinsi di Indonesia. DAK Fisik bidang Pendidikan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, karena masih banyak sekali sekolah-sekolah yang belum memiliki fasilitas yang layak bagi siswa untuk kegiatan belajar. DAK Fisik bidang Pendidikan memiliki tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sebagai perwujudan untuk meningkatkan SDM melalui peningkatan ketersediaan/keterjaminan akses dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan wajib belajar 12 tahun berkualitas.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

Gambar 1.3 **DAK Fisik Bidang Pendidikan Enam Provinsi di Pulau Jawa** **Tahun 2018-2023**

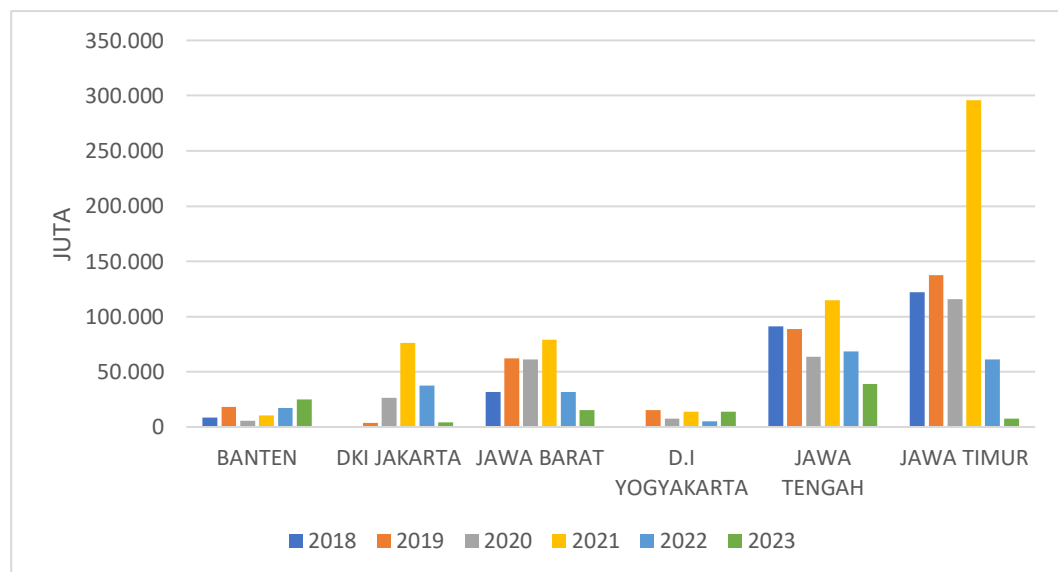
Dalam gambar 1.3 dapat dilihat data DAK Fisik bidang Pendidikan enam provinsi di Pulau Jawa tahun 2018-2023. Dalam enam tahun terakhir terjadi fluktuasi jumlah DAK Fisik bidang Pendidikan yang diterima oleh enam provinsi tersebut, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi dalam penerimaan DAK Fisik bidang Pendidikan di antara provinsi yang lain, di tahun 2023 provinsi Jawa Barat menerima sekitar Rp. 408,6 Miliar, disusul Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi tertinggi kedua dalam penerimaan DAK Fisik bidang Pendidikan dengan nilai Rp. 373 Miliar di tahun 2023, lalu ada Provinsi Banten dengan nilai Rp. 107,7 Miliar, lalu Provinsi D.I Yogyakarta dengan nilai Rp. 80,5 Miliar dan Provinsi Jawa Tengah dengan nilai Rp. 10,07 Miliar di tahun 2023. Namun ada fakta menarik bahwasanya Provinsi DKI Jakarta di lima tahun terakhir tidak menerima alokasi

dana DAK Fisik bidang Pendidikan, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni : 1) Pemerintah daerah tidak mengajukan usulan, 2) Kebijakan Pemerintah untuk tidak mengalokasikan daerah tersebut (tidak termasuk lokasi prioritas nasional), 3) Pemerintah daerah mengajukan usulan tapi tidak layak secara teknis, 4) Kepada Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan/atau melampaui batas waktu penyampaian pelaporan (Ananda, 2019).

Selain aspek pendidikan, untuk mendorong kualitas pembangunan manusia di suatu negara ada aspek lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, yakni aspek kesehatan. Aspek kesehatan ini sangat diperlukan untuk ditingkatkan karena ketika masyarakat suatu negara memiliki kualitas kesehatan yang terjaga, maka aktivitas pembangunan akan tercapai dengan baik. Kualitas kesehatan masyarakat yang baik dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas/sarana prasarana kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu dan lain-lain. Kemudahan akses layanan kesehatan tidak kalah penting dari hanya sekedar ketersediaan infrastruktur kesehatan, karena akses pelayanan kesehatan berbicara tentang kemudahan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan, seperti layanan jaminan kesehatan nasional, bantuan obat-obat dan lain-lain.

Pembangunan infrastruktur kesehatan di Indonesia telah tercantum dalam DAK Fisik bidang Kesehatan. DAK Fisik bidang Kesehatan ditujukan untuk mendukung daerah dalam penyediaan dana pembangunan bidang kesehatan sebagai upaya mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan. Tujuan khusus dari DAK Fisik bidang Kesehatan adalah untuk : 1) Meningkatkan ketersediaan SPA di Puskesmas, RSUD dan Labkesda sesuai standar 2) Meningkatkan ketersediaan obat

esensial bermutu, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai di puskesmas 3) Meningkatkan kualitas instalasi farmasi dalam melakukan pengelolaan obat dan vaksin 4) Meningkatkan ketersediaan sarana dan alat kesehatan untuk program gizi masyarakat di kabupaten/kota lokus prioritas penguatan intervensi *stunting* 5) meningkatkan ketersediaan alat kesehatan untuk PONED dan PONEK di kabupaten/kota lokus kegiatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) (Indra, 2022).



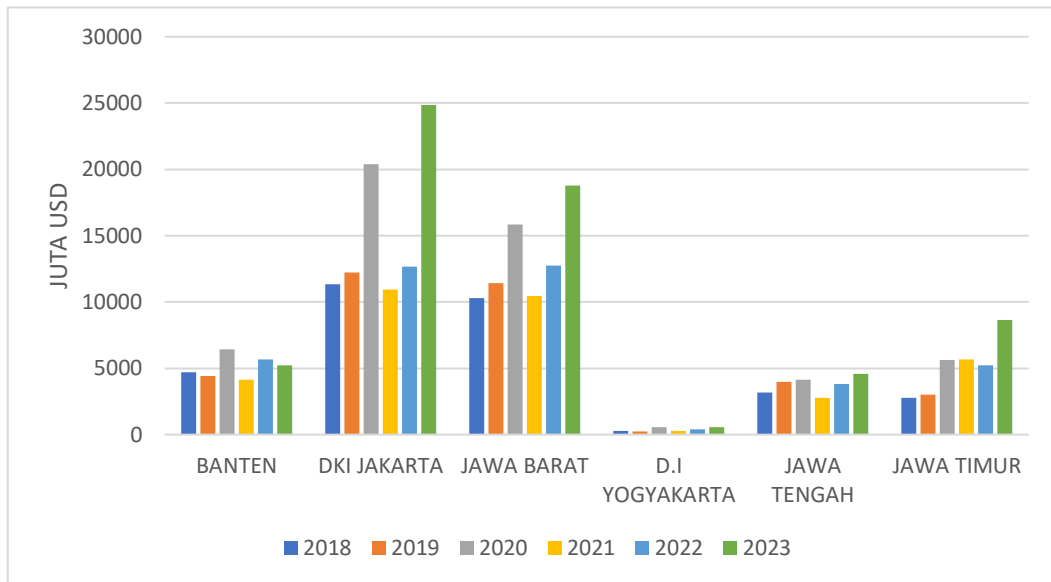
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

Gambar 1.4
DAK Fisik Bidang Kesehatan Enam Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2018-2023

Berdasarkan gambar 1.4 terlihat penerimaan DAK Fisik bidang Kesehatan enam Provinsi di Pulau Jawa mengalami fluktuasi. Di tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah menjadi Provinsi tertinggi dalam penerimaan DAK Fisik bidang Kesehatan dengan nilai Rp. 38,9 Miliar, disusul Provinsi Jawa Banten dengan nilai Rp. 25 Miliar, lalu ada Provinsi Jawa Barat dengan nilai Rp. 15 Miliar, Provinsi D.I

Yogyakarta dengan nilai Rp. 13,6 Miliar dan Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp. 7,5 Miliar serta Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dalam penerimaan DAK Fisik bidang Kesehatan terendah dibandingkan dengan provinsi lain dengan nilai Rp. 4,1 Miliar. Ada fenomena menarik yakni di tahun 2021 terjadi lonjakan yang sangat tajam di Provinsi Jawa Timur tepatnya di tahun 2021, Provinsi Jawa Timur menerima DAK Fisik bidang Kesehatan sebesar Rp. 296,5 Miliar. Nilai tersebut merupakan nilai terbesar dibanding dengan lima provinsi lainnya di pulau Jawa di tahun yang sama.

Dalam perkembangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia kiranya perlu didukung dari sektor lain untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas manusia di Indonesia. Sektor lain dalam hal ini adalah sektor investasi khususnya sektor investasi asing/ Penanaman Modal Asing (PMA). Terdapat korelasi antara PMA dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia, yakni terletak pada kemampuan PMA dalam mendorong daya beli masyarakat, ketika tingkat PMA di suatu negara tinggi maka akan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan, sehingga dengan masyarakat memiliki pekerjaan memiliki konsekuensi masyarakat memiliki pendapatan dan dengan pendapatan tersebut akan meningkatkan daya beli untuk dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengakses pendidikan dan kesehatan demi tercapainya kualitas kehidupan yang lebih baik.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar 1.5
PMA Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2023

Berdasarkan gambar 1.5 dapat dilihat Penanaman Modal Asing (PMA) enam Provinsi di Pulau Jawa mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Secara keseluruhan dari enam tahun terakhir Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penerimaan PMA tertinggi dibanding dengan provinsi lainnya. Pada tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai investasi sebesar 248 Juta USD, disusul oleh Provinsi Jawa Barat dengan nilai 187 Juta USD, lalu ada Provinsi Banten dengan nilai 52 Juta USD, Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 45 Juta USD dan Jawa Timur dengan nilai 8 Juta USD serta Provinsi D.I Yogyakarta sebagai provinsi dengan nilai PMA terendah dibanding dengan lima provinsi lainnya di pulau Jawa dengan nilai sebesar 5 Juta USD.

Berdasarkan fenomena serta kebaruan yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Analisis Penentu Indeks Pembangunan Manusia Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2023**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan penanaman modal asing secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia enam provinsi di pulau Jawa tahun 2018-2023?
2. Bagaimana pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan penanaman modal asing secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia enam provinsi di pulau Jawa tahun 2018-2023?
3. Bagaimana elastisitas Indeks Pembangunan Manusia terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan penanaman modal asing enam provinsi di pulau Jawa tahun 2018-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai:

1. Bagaimana pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan penanaman modal asing secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia enam Provinsi di pulau Jawa tahun 2018-2023.

2. Bagaimana pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan penanaman modal asing secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia enam Provinsi di pulau Jawa tahun 2018-2023.
3. Bagaimana elastisitas Indeks Pembangunan Manusia terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan penanaman modal asing enam provinsi di pulau Jawa tahun 2018-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan maupun pihak secara menyeluruh.

1. Kegunaan Ilmiah

Adapun kegunaan ilmiah penelitian ini antara lain:

- 1) Memberikan sumbangan ilmiah dalam penelitian mengenai indeks pembangunan manusia di Indonesia, khususnya dalam kajian penelitian indeks pembangunan manusia lingkup regional provinsi di Indonesia.
- 2) Memberikan sumbangan ilmiah dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di pulau Jawa, khususnya faktor infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan yang masih sedikit dari segi kuantitas dalam berbagai penelitian di Indonesia.
- 3) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan indeks pembangunan manusia di Indonesia serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis penelitian ini antara lain:

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan tambahan mengenai laju pertumbuhan ekonomi, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan penanaman modal asing secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia enam Provinsi di pulau Jawa.

2) Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat strategi kebijakan untuk meningkatkan dan pemeratakan pembangunan manusia di enam Provinsi di Pulau Jawa.

3) Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademis dan dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

4) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia enam Provinsi di Pulau Jawa.

1.5 Lokasi dan Tempat Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada enam Provinsi di Pulau Jawa dengan pengambilan data menggunakan *website* Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk). *Website* tersebut menyajikan data-data yang valid mengenai indeks pembangunan manusia pada enam Provinsi di Pulau Jawa.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak diterbitkannya surat keputusan tentang pembimbing skripsi/tugas akhir pada tanggal 5 Februari 2024. Adapun jadwal penelitian yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 1.1

